



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 7300-7312

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Evaluasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin Melalui Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) (Studi Kasus Di SMA Negeri 4 Kota Cirebon)

Iim Rohimatun Nahdiyyah^{1✉}

Politeknik Siber Cerdika Internasional

Email: iim_rohimatun@polteksci.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi umum evaluasi kebijakan Bantuan Siswa Miskin di SMA Negeri 4 Kota Cirebon; untuk mengetahui sejauh manakah kebijakan Bantuan Siswa Miskin terhadap siswa SMA Negeri 4 Kota Cirebon; untuk Mengetahui Upaya manakah kebijakan Bantuan Siswa Miskin terhadap siswa di SMA Negeri 4 Kota Cirebon di SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Alasan penulis mengambil objek penelitian di atas karena ingin mengetahui bagaimana tempat pelaksanaan kebijakan bantuan siswa miskin melalui program Kartu Indonesia Pintar tersebut yang awalnya terdapat kekurangan sehingga kurang optimal sehingga kedepannya menghasilkan yang baik di masa yang akan datang. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kebijakan SMA Negeri 4 Kota Cirebon setelah di evaluasi cukup efektif. Dampak evaluasi kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMAN 4 Kota Cirebon di harapkan memberikan dampak yang positif diantaranya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Upaya Evaluasi Kebijakan Siswa Miskin (BSM) DI SMA Negeri 4 Kota Cirebon pemerintah dalam memberikan pendidikan yang layak dan berkualitas melalui berbagai usaha seperti pengembangan kurikulum nasional dan lokal.

Kata Kunci: *Kata kunci berisi ide-ide atau konsep dasar yang mewakili bidang yang diteliti. Jumlah kata kunci antara 3-5 Frasa dan diurutkan menurut abjad*

Abstract

This research aims to determine the general condition of the evaluation of the Poor Student Assistance policy at SMA Negeri 4 Cirebon City; to find out the extent of the Mikin Student Assistance policy for students at SMA Negeri 4 Cirebon City; to find out what measures are available for the Poor Student Assistance policy for students at SMA Negeri 4 Cirebon City at SMA Negeri 4 Cirebon City. The reason the author took the research object above was because he wanted to know how to implement the policy for helping poor students through the Smart Indonesian Card program, which initially had shortcomings so it was less than optimal so that in the future it would produce good results in the future. The results of the research show that the implementation of the Cirebon City 4 Public High School policy after evaluation is quite effective. The impact of the evaluation of the Poor Student Assistance (BSM) policy at SMAN 4 Cirebon City is expected to have a positive impact, including being able to continue their education to a higher level. Efforts to evaluate the Poor Student Policy (BSM) at SMA Negeri 4 Cirebon City by the government in providing decent and quality education through various efforts such as developing national and local curricula.

Keywords: Keywords contain basic ideas or concepts that represent the field under study; The number of keywords is between 3-5 Phrases and are sorted alphabetically

PENDAHULUAN

Salah satu indikator kemajuan pembangunan suatu bangsa adalah tingkat capaian pembangunan Sumber Daya Manusianya, bahkan pendidikan menjadi domain utama bagi setiap negara yang ingin maju dan ingin menguasai teknologi. Setiap negara mempunyai kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsanya tanpa terkecuali, Pemerintah Indonesia dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menegaskan tentang tujuan nasional yaitu :

“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melekasanakan ketertiban dunia berdasarkian kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan social”

Dalam alenia diatas mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya demi pencapaian sebuah tujuan nasional.

Pendidikan, khususnya pendidikan dasar merupakan kebutuhan dasar setiap warga Negara. oleh karena itu,upaya peningkatan mutu pendidikan mutlak harus dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia bangsa Indonesia.hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalamnya di atur tentang maksud dari pendidikan, yaitu pada pasal I ayat (1) sebagai berikut:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Maksud sebagaimana di atas yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan untuk pencapaian pembangunan yang berakhlak mulia agar berguna untuk suatu bangsa.

Secara umum kualitas pendidikan di pengaruhi oleh empat kriteria yang pertama kualitas awal peserta didik, kualitas penggunaan, pemilihan sumber-sumber pendidikan yang berkualitas dan proses belajar mengajar. Dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa tentu tidak lepas dari beberapa kendala, salah satunya kendala adalah dalam hal biaya pendidikan terutama bagi keluarga kurang mampu dan keluarga miskin. Terbukti banyak anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu dan keluarga miskin "terpaksa" tidak sekolah bahkan tidak sedikit yang lebih memilih ikut bekerja membantu orang tuanya dari pada untuk pendidikan sekolah.

Berdasarkan Data Balai Pusat Statistik Kriteria siswa miskin adalah orang tua atau kepala keluarga tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, tidak berpenghasilan tetap dan penghasilan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan makan-minum 3 kali sehari dengan jumlah keluarga 4 orang, tempat tinggal dari dinding kayu/tembok yang tidak sempurna, lantai masih berupa tanah/plesteran, telah mendapatkan kartu raskin. Sedangkan untuk keluarga tidak mampu, mereka telah bekerja tetap akan tetapi penghasilan kurang/tidak mencukupi untuk memehuni kebutuhan hidup keluarganya dan tidak mendapatkan kartu raskin yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik setempat dan membawa surat tidak mampu dari Lurah

Dalam rangka mewujudkan cita-cita kualitas pendidikan nasional, Pemerintah terus berupaya melakukan peningkatan mutu pendidikan yang layak, dengan cara berusaha menjangkau semua lapisan masyarakat agar dapat mengikuti pendidikan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu upaya agar masyarakat dapat mengikuti pendidikan layak, pemerintah menggulir sebuah kebijakan dalam bentuk suatu program kebijakan yang di kenal kebijakan "BSM" (Bantuan Siswa Miskin) melalui progrma KIP yaitu bantuan dari pemerintah kepada sekolah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan langsung kepda siswa yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu

Kebijakan bantuan siswa miskin oleh Pemerintah Pusat di berikan sumbangan berupa dana pendidikan ke sekolah-sekolah setingkat SD (Sekolah Dasar) sampai SMA (Sekolah Menengah Atas) dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) baik negeri maupun swasta. Kebijakn Bantuan Siswa Miskin (BSM) tersebut dicanangkan sebagai pelengkap dari program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dengan Tujuan untuk membantu penanggulangan dalam hal

kebutuhan siswa dan pembiayaan seolah. Bantuan Siswa Miskin (BSM) ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengatasi biaya-biaya pendidikan secara tidak langsung yang harus dikeluarkan oleh keluarga rumah tangga miskin dan kurang mampu seperti biaya pembelian tas sekolah, pembelian buku, pembelian alat tulis dan tunggakan-tunggakan sekolah

Pelaksanaan penyaluran dana bantuan Bantuan Siswa Miskin Melalui Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Negeri 4 Kota Cirebon Setiap Tahun akan tergambar dalam sebuah tabel di bawah berikut ini :

Tabel 1
Rekapitulasi Data Jumlah Penerima KIP
di SMA Negeri 4 Kota Cirebon

Tahun	Kelas	Jumlah Dana	Tanggal SK	Nama BANK
2018	X	Rp. 1.000.000	02 April 2018	BNI
	XI	Rp. 1.000.000	02 April 2018	
	XII	Rp. 500.0000	13 Maret 2018	
2019	X	Rp.1.000.000	08 April 2019	BNI
	XI	Rp. 1.000.000	04 Februari 2019	
	XII	Rp. 500.000	04 Februari 2019	
2020	X	Rp. 1.000.000	05 Mei 2020	BNI
	XI	Rp. 1.000.000	05 Mei 2020	
	XII	Rp. 500.0000	05 Mei 2020	

Sumber: SMA Negeri 4 Kota Cirebon 2020

Bantuan kebijakan KIP diterima langsung oleh tiap siswa melalui pemberitahuan dari sekolah dengan langsung mengambil dananya melalui Rekening BNI untuk digunakan langsung kebutuhan yang berkaitan dengan sekolah (pendidikan). Berdasarkan tujuan dengan di adakan kebijakan BSM diharapkan untuk bisa mengatasi lambatan pembiayaan dan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan bagi siswa miskin agar tidak putus sekolah dan tetap bisa melanjutkan ke perguruan tinggi setidaknya dapat memehuni program belajar sembilan tahun.

Rekap data siswa penerima Kartu Indonesia Pintar di SMA Negeri 4 Kota Cirebon, penulis dapat kemukakan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 2

Rekapitulasi Data Siswa Penerima KIP di SMA Negeri 4 Kota Cirebon

No	Tahun	Jumlah Siswa
1	2018	167
2	2019	125
3	2020	159

Sumber: SMA Negeri 4 Kota Cirebon 2020

Di dalam Pemanfaat dana KIP tersebut terdapat permasalahan seperti, dengan adanya pengambilan dana BSM siswa-siswi tersebut ada perasaan Malu.

Maka dengan itu perlu adanya evaluasi kebijakan setiap tahunnya untuk mengetahui bagaimana kondisi permasalahan yang akan timbul kembali kedepannya dari sebuah kebijakan bantuan siswa miskin tersebut sehingga ada perbaikan dan penanganan yang akan terjadi di awal pelaksanaannya baik dilihat dari pengevaluasian bantuan tersebut serta dari penanggulangan dampak kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulis artikel ini, peneliti yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui kondisi umum evaluasi kebijakan Bantuan Siswa Miskin di SMA Negeri 4 Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui sejauh manakah kebijakan Bantuan Siswa Miskin terhadap siswa SMA Negeri 4 Kota Cirebon.
3. Untuk Mengetahui Upaya manakah kebijakan Bantuan Siswa Miskin terhadap siswa di SMA Negeri 4 Kota Cirebon.

Kegunaan praktis yaitu diharapkan dapat memberi masukan berupa saran yang terkait untuk Dinas Pendidikan Kota Cirebon pada khususnya dalam peningkatan dan perbaikan bantuan siswa miskin dalam akses mutu pendidikan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong (2010:6) penelitian kualitatif adalah: penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain- lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah” Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Lexy J. Moleong 2010:4) “penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian berupa kata-kata ataupun data

bersifat deskriptif dari perilaku ataupun informasi lisan yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, penulis memilih peneliti yaitu di SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Alasan penulis mengambil objek penelitian di atas karena ingin mengetahui bagaimana tempat pelaksanaan kebijakan bantuan siswa miskin melalui program Kartu Indonesia Pintar tersebut yang awalnya terdapat kekurangan sehingga kurang optimal sehingga kedepannya menghasilkan yang baik di masa yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Evaluasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin Melalui Program Kartu Indonesia Pintar Di Kota Cirebon (studi kasus SMA Negeri 4 Kota Cirebon)

Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan hasil dari pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang telah Kota Cirebon. Dinas tidak dapat mengevaluasi sesuatu apabila tidak diketahui kebijakan apa yang ingin di evaluasi. Evaluasi kebijakan publik adalah sebuah penilaian terhadap kebijakan - kebijakan politik dalam bidang sosial yang menyangkut kehidupan publik. Evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Menurut William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik menjelaskan bahwa evaluasi merupakan salah satu proses ataupun siklus kebijakan publik.

Pada dasarnya evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai apakah tujuan dari kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut telah tercapai atau tidak. Realitanya suatu konsep evaluasi tidak hanya sekedar menghasilkan sebuah kesimpulan mengenai tercapai atau tidaknya sebuah kebijakan atau masalah telah terselesaikan tetapi evaluasi juga berfungsi sebagai klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam memyeleiskan masalah pada proses kebijakan selanjutnya. Kebijakan merupakan sesuatu yang bermanfaat dan juga merupakan penyederhanaan sistem yang dapat membantu dan mengurangi masalah-masalah dan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah tertentu, oleh sebab itu suatu kebijakan dianggap sangat penting.

William Dunn menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik, pengertiannya sebagai berikut : "Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan - keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah" (Dunn, 2003 : 132). Kebijakan publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan.

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi kebijakan mempunyai definisi yang beragam, William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa : "Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata - kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.

Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan" (Dunn, 2003 : 608). Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dan suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Kriteria - kriteria evaluasi kebijakan di atas merupakan tolak ukur atau indikator dari evaluasi kebijakan publik.

Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan yang dirumuskan oleh William Dunn untuk setiap kriterianya. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Pendidikan adalah serangkaian usaha untuk pengembangan bangsa. Pengembangan bangsa itu akan dapat diwujudkan secara nyata dengan usaha menciptakan ketahanan nasional dalam, rangka mencapai cita - cita bangsa. Mengingat hal itu, maka sistem pendidikan akan diarahkan kepada perwujudan keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara pengembangan kuantitas dan pengembangan kualitas serta aspek lahiriah dan aspek rohaniah, itulah sebabnya pendidikan nasional kita dirumuskan sebagai usaha sadar untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Pelaksanaan program pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia pada umumnya tidak akan berhasil tanpa didasarkan pada kebijakan pemerintah. Kebijakan Pemerintah bidang pendidikan merupakan dasar hukum bagi operasional pendidikan nasional. Pada dasarnya program pendidikan dengan tujuannya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, merupakan program yang sentralistik. Sentralistik artinya bahwa pemerintah pusat menginginkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan pendidikan nasional. Kemudian Pemerintah Daerah memiliki atau diberi kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan Pendidikan di daerahnya masing - masing dengan dasar tujuan

tersebut. Dengan demikian antara pemerintah dengan pemerintah daerah akan terjalin koordinasi yang baik.

Indonesia memang sangat erat dengan permasalahan pendidikan, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Banyak dari mereka yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena berbagai persoalan ekonomi dan sosial budaya. Fakta-fakta tersebut hanya sebagian kecil dari betapa pendidikan di Negeri ini masih merasakan belum tersentuh oleh pendidikan formal, kualitas pendidikan yang masih dipertanyakan, banyak anak-anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi akibat tidak punya biaya karena pendidikan yang mahal, dan akibat-akibat buruk lainnya yang diakibatkan oleh permasalahan pendidikan yang ada selama ini.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan program baru untuk menangani masalah pendidikan bagi siswa yang kurang mampu yang disebut Bantuan Siswa Miskin (BSM). Hal ini didasarkan pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu. Sebagai implementasi dari undang-undang tersebut pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan diina dalam pasal 2 ayat 1 berbunyi bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Berdasarkan peraturan tersebut dalam rangka pemerataan pendidikan khususnya memberikan kesempatan kepada anak yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dapat tetap bersekolah, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama RI memberikan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Tujuan pemerintah pusat mengembangkan pendidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan membekali anak usia sekolah memiliki life skill yang diharapkan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Begitu juga halnya dengan Kota Cirebon, di mana sesuai dengan pelimpahan kewenangan bidang

pendidikan, melakukan berbagai upaya agar tugas otonomi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengimplementasikan kebijakan bidang pendidikan. Salah satu kebijakan bidang pendidikan adalah program bantuan siswa miskin.

Beberapa tahun ke belakang akses pendidikan tidak secara luas terbuka, hal tersebut ditandai dengan banyaknya anak usia sekolah yang tidak sekolah atau gagal sekolah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Banyak terjadi drop out anak usia sekolah di sekolah menengah bahkan di sekolah dasar. Hal tersebut terjadi karena jumlah unit pendidikan (penyelenggara teknis pendidikan) masih relatif sedikit dan berbayar. Kemudian lembaga swasta ikut dan turut serta menyelenggarakan pendidikan sehingga jumlah sekolah cukup banyak dan mampu membuka akses anak usia sekolah untuk mengikuti pendidikan. Akan tetapi, jumlah sekolah saja nampaknya masih belum cukup untuk membuka akses seluas-luasnya, masih ada kendala sehingga banyak anak usia sekolah yang gagal mengikuti pendidikan. Salah satunya tingkat kemampuan ekonomi keluarga untuk membiayai anaknya mengikuti jenjang sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Sejalan dengan itu pemerintah mengeluarkan beberapa program untuk dapat membantu keluarga miskin agar anaknya dapat mengikuti pendidikan.

Program Bantuan Siswa Miskin adalah salah satu kebijakan pemerintah untuk membantu siswa yang masih berada di garis kemiskinan untuk dapat mengatasi kesulitan-kesulitan orang tua untuk membiayai kebutuhan anaknya yang tidak dicover oleh KIP sebagaimana mestinya. Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pendekatan teori dari Dunn 2003:610) yang memandang bahwa kriteria evaluasi dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan yang terbagi atas 6 (enam) kriteria yang meliputi:

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan

Merupakan landasan teoritis dalam melakukan analisis penelitian ini. Adapun hasil analisis dan pembahasannya masing-masing kriteria evaluasi kebijakan menurut parameter

yang telah ditentukan sebelumnya dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Efektivitas

Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika hasilnya mampu mencapai target yang ditentukan. Tidak menekankan bagaimana cara melakukannya dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk itu. Selama biaya yang diperantukan untuk mendukung pekerjaan tersebut masih standar dan selama cara yang dilakukan juga masih tergolong wajar. Di sisi lain jika tujuannya tercapai maka pekerjaan dinyatakan efektif. Efektivitas pelaksanaan suatu program dibahas dengan dasar pertanyaan bahwa apakah hasil dari pelaksanaan program tersebut telah tercapai atau belum. Hal ini menunjukkan bahwa program dilihat dari hasil akhir.

2. Kecukupan

BSM (Bantuan Siswa Miskin) adalah suatu kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah guna membantu keluarga miskin untuk mengatasi hambatan dalam biaya sekolah. Untuk itu diharapkan program ini memiliki cakupan yang cukup luas, artinya semua siswa miskin dapat memenuhi kebutuhan terutama dalam hal pendidikan.

3. Perataan

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa BSM (Bantuan Siswa Miskin) sebagai kebijakan pemerintah dalam hal penanggulangan kemiskinan yang dikonsentrasikan dalam hal pendidikan, maka diharapkan pelaksanaannya dapat memenuhi kriteria perataan. Apakah biaya dan penyalurannya bermanfaat dan bisa didistribusikan dengan merata kepada kelompok - kelompok yang berbeda. Penerima BSM adalah siswa berasal dari keluarga kurang mampu / miskin, orangtua-siswa penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS), siswa penerima Kaitu Calon Penerima Bantuan Siswa Miskin, orangtua siswa peserta Program Keluarga Harapan (PKH), siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya, siswa yatim, piatu, siswa yang berasal dari panti asuhan dan siswa berasal dari korban musibah, korban bencana, korban PKH dari Rumah Tangga Sangat Miskin dan siswa dari program keahlian (SMA).

4. Responsivitas

Suatu kebijakan dikatakan berhasil jika mampu memuaskan kebutuhan masyarakat yang menjadi obyek kebijakan tersebut. Begitu juga halnya dengan program BSM (Bantuan - Siswa Miskin), dimana pelaksanaan BSM harus mampu memuaskan para siswa miskin yang menjadi obyek kebijakan. Tinggi rendahnya tingkat kepuasan siswa menunjukkan berhasil tidaknya kebijakan tersebut.

5. Ketepatan

Berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu program dalam rangka mengoptimalkan kemanfaatannya, maka perlu juga diperhatikan unsur ketepatan. Suatu program, dikatakan berhasil jika memiliki unsur ketepatan, terutama tepat sasaran.

B. Dampak Evaluasi Kebijakan BSM di SMA Negeri 4 Kota Cirebon terhadap Siswa.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembangunan suatu bangsa akan terlaksana dan mencapai kesuksesan sesuai dengan tujuan, jika dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa instrumen penting. Salah satu instrumen penting yang mampu mendukung pelaksanaan pembangunan suatu bangsa adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia dalam suatu negara, maka akan semakin optimal dukungan terhadap pemerintah dalam melaksanakan pembangunannya, begitu pun sebaliknya

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka pemerintah perlu melakukan berbagai upaya agar kualitas sumber daya manusia meningkat. Salah satu upaya yang penting dilakukan adalah pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai upaya yang paling utama untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tentunya pendidikan yang dikelola dengan mutu dan kualitas yang tinggi dan profesional Sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin tinggi mutu dan kualitas pendidikan, maka akan semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusianya, begitu pun sebaliknya. Untuk itu upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan merupakan upaya penting untuk diperhatikan dan terus ditingkatkan.

Berbagai upaya harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, salah satunya mengeluarkan kebijakan-kebijakan baik kebijakan administratif maupun kebijakan teknis bidang pendidikan. Salah satu kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan adalah BSM (Bantuan Siswa Miskin).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian mengenai evaluasi kebijakan Bantuan Siswa Miskin di SMA Negeri 4 Kota Cirebon di penulis menyimpulkan sebagai berikut : *Pertama*, Pelaksanaan kebijakan SMA Negeri 4 Kota Cirebon setelah di evaluasi cukup efektif karena tujuan dari BSM itu sendiri seperti; mengurangi hambatan siswa miskin dalam mengakses pendidikan, mencegah putus sekolah karena kesulitan biaya terutama dalam pendidikan, membantu siswa atau personal dalam memenuhi kegiatan pembelajaran. Evaluasi kebijakan

bantuan siswa miskin di SMA Negeri 4 Kota Cirebon belum efisien, karena siswa yang memperoleh dana bantuan tersebut tidak dipergunakan dengan semestinya sehingga beban siswa orangtua bertambah terutama yang berkaitan dengan sekolah. Setelah mengevaluasi kebijakan BSM bahwa kecukupan itu belum cukup, karena ada sebagian orang tua siswa yang masih mengeluh bahwa dana tersebut belum bisa menggantikan keseluruhan pembiayaan kebutuhan siswa maupun sekolah. Evaluasi kebijakan BSM (Bantuan Siswa Miskin) dalam hal pemerataan masih belum merata. Hal ini terlihat sekolah yang mendapatkan dana bantuan siswa miskin, tidak seluruhnya mendapatkan, masih terdapat siswa dalam kategori miskin belum mendapatkan sepenuhnya. Selain itu, anggaran dan pusat yang diberikan daerah untuk penggunaan dana ini belum merata seluruhnya dibagikan ke seluruh sekolah. Responsif SMAN Negeri 4 Kota Cirebon terhadap responsivitas sudah cukup responsif. Walaupun masih ada sebagian siswa yang mendapatkan dana tersebut malu karena dikategorikan siswa miskin dan keluarga tidak mampu. Kebijakan BSM di SMA Negeri 4 Kota Cirebon setelah di evaluasi belum mencapai ketepatan. Hal ini ditandai dalam pemanfaatan dana tersebut baik kegunaan, manfaat dan sasarannya masih belum tercapai dengan baik dan seharusnya.

Kedua, Dampak evaluasi kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMAN 4 Kota Cirebon diharapkan memberikan dampak yang positif diantaranya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mendapatkan fasilitas dan hak yang sama dalam proses kegiatan belajar mengajar, dengan adanya Bantuan Siswa Miskin bisa memutus rantai kemiskinan, orang tua siswa bisa memberikan dan menyediakan penunjang belajar untuk anak-anaknya.

Ketiga, Upaya Evaluasi Kebijakan Siswa Miskin (BSM) DI SMA Negeri 4 Kota Cirebon pemerintah dalam memberikan pendidikan yang layak dan berkualitas melalui berbagai usaha seperti pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui 6 pelatihan, pengadaan buku pembelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan sistem manajemen sekolah. Namun, berbagai indikator mutu pendidikan masih cukup rendah. Salah satunya akibat dari rendahnya partisipasi pendidikan pada kelompok masyarakat miskin yang disebabkan tingginya biaya pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustustino, Leo 2008 Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Anggota IKAPI Dan CV Alfabeta
- Bogdan Robert dan Setevan J Taylor, 1992. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial. Surabaya: Usaha Nasional
- Cresswel, W. John. 2010. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Diterjemahkan oleh Achmad Fawald. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dunn, Wiliam N, 2010. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Penerjemah Wibawa Samodra. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Dwijowijoto. 2004. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia

Moleong. Lexy, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Nawawi, ismail. 2007. Public Policy Analisis Strategi Teori dan Praktek Surabaya: ITS Press

Nugroho, Riant. 2011. Public: Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan. Jakarta: penerbit PT. Elex Media Komputindo

Poerwadarminta, 2010. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka

Subarso, 2010. Analisis Kebijakan Publik. jogjakarta: Pustaka Belajar.

Sugiyono. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta & Anggota IKAPI

Peraturan Perundangan:

Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu. Sebagai Implementasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dimana dalam pasal 2 ayat 1 berbunyi bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.